



Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Muslim Sabarismann ^{1*} Muhammad Belanawane Sulubere ² , Johan Arifin¹

1 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, BadanRiset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

2 Pusat Riset Kebijakan Publik, BadanRiset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: sleem.ndr@gmail.com ; Tel: +62-8129-643-0470

Diterima: 1 Oktober 2024; Disetujui: 20 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak: Artikel ini mengkaji kontribusi intervensi berbasis kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan jaringan sosial bagi penerima program bantuan sosial transfer bersyarat Indonesia, Program Keluarga Harapan. Melalui studi kasus pada Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto, digunakan metode kualitatif dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan dokumentasi dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan dinas pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa ProKUS berhasil mendorong peningkatan relatif pendapatan keluarga melalui berbagai kegiatan usaha mikro seperti produksi sepatu dan penjualan makanan keliling. Selain itu, interaksi dalam komunitas kewirausahaan ini memperkuat jaringan sosial di kalangan penerima manfaat, menciptakan solidaritas dan saling dukung yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan usaha. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ProKUS, di antaranya keterbatasan modal, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala akses teknologi. Studi ini merekomendasikan peningkatan akselerasi model peningkatan pendapatan KPM PKH melalui model kewirausahaan dengan pelatihan usaha yang lebih relevan, akses modal yang berkelanjutan, dan kemudahan izin administrasi usaha. Dengan mengatasi tantangan ini dan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas usaha lokal, ProKUS berpotensi menciptakan keluaran ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat PKH menuju keamanan finansial yang merupakan prasyarat vital bagi *upward mobility*.

Kata kunci: Kewirausahaan, kewirausahaan sosial, kemandirian ekonomi, jaringan sosial

Abstract: This article examines the contribution of entrepreneurship-based interventions in increasing economic independence and social networks for recipients of Indonesia's conditional cash transfer program, the Program Keluarga Harapan. Through a case study of the Social Entrepreneurship Program (ProKUS) in Mojokerto Regency, a qualitative method was used with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation reviews from beneficiaries, programme's assistants, and local government agencies. The findings show that ProKUS has succeeded in encouraging a relative increase in family income through various micro-enterprise activities such as shoe production and mobile food sales. In addition, interactions within this entrepreneurial community strengthen social networks among beneficiaries, creating solidarity and mutual support which are important factors for business success. However, there are several challenges in implementing ProKUS, including limited capital, lack of entrepreneurial skills, and obstacles to accessing technology. This study recommends increasing the acceleration of the PKH KPM income-increasing model through an entrepreneurship model with more relevant business training, sustainable access to capital, and ease of business administration permits. By addressing these challenges and strengthening synergies between the governments, private sector, and local business communities, ProKUS has the potential to create sustainable economic and social outcomes for PKH beneficiary families towards financial security, a vital preconditions for upward mobility.

Keywords: Entrepreneurship, social entrepreneurship, economic independence, social networks

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah kondisi ketidakcukupan penduduk memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan oleh pengeluaran per kapita perbulannya masih di bawah garis kemiskinan (Ardi Adji, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhiman, Sandra Kurniawati, 2020). Ini mencakup pendapatan untuk kebutuhan hidup, akses ke hak dasar, keadilan dalam perlakuan hukum, kesetaraan gender, dan kehidupan yang beradab serta bermartabat (International, 2023). Namun demikian, kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan harta benda, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan dan akses ke layanan vital. Kemiskinan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait dan dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup seseorang (Laurens & Putra, 2020).

Masalah kesenjangan ekonomi menjadi isu global yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh banyak negara dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Mengatasi masalah ini, konsep Negara Kesejahteraan diperkenalkan. Konsep ini mencerminkan peran aktif pemerintah dalam melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap warga negara (Dekki & Dody, 2022). Negara Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Pierson, 1998).

Negara Kesejahteraan menghendaki pemerintah bukan hanya sekadar memelihara ketertiban hukum, tetapi juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya (Svallfors, 2007). Lebih lanjut Svallfors menjelaskan, kesejahteraan mencakup banyak bidang, dimana program pemerintah dijalankan memastikan semua warga mendapatkan akses ke sumber daya yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak. Peran institusi, keterbelahan sosial, dan orientasi budaya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan dan keberlanjutan program mengatasi kemiskinan. Svallfors melihat besarnya pengaruh sistem politik dan distribusi kekuasaan terhadap kebijakan kesejahteraan, dampak perbedaan sosial terhadap pandangan publik, serta bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi legitimasi dan popularitas program-program kesejahteraan sosial.

Alkire & Santos (Alkire & Santos, 2014), membagi kemiskinan menjadi dua jenis: kemiskinan primer (primary poverty) dan kemiskinan sekunder (secondary poverty). Kemiskinan primer adalah situasi di mana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, sedangkan kemiskinan sekunder terjadi ketika pendapatan sebenarnya cukup, tetapi tidak digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diperlukan pendekatan pemberdayaan ekonomi pada kemiskinan jenis ini melalui usaha ekonomi produktif dengan tetap menguatkan ikatan sosial.

Salah satu yang didorong dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dengan menguatkan ikatan sosial adalah konsep kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial telah muncul sebagai bidang dinamis yang memanfaatkan kekuatan inisiatif kewirausahaan untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan pembangunan berkelanjutan (Boffa et al., 2023). Kewirausahaan sosial semakin mendapat perhatian dari para akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi pembangunan sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks (Chundu et al., 2022) (Bansal et al., 2019). Ini melibatkan penerapan prinsip dan strategi kewirausahaan yang inovatif untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang menciptakan nilai sosial, daripada hanya mengejar maksimalisasi keuntungan (Shaw & Carter, 2007). Konsep kewirausahaan sosial berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kewirausahaan, sosiologi, dan studi pembangunan. Kewirausahaan sosial sering kali dicirikan sebagai bentuk kewirausahaan yang mengutamakan dampak sosial

daripada keuntungan finansial. Kewirausahaan sosial didorong oleh misi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, dan mereka memanfaatkan pendekatan kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks (Iyengar, 2014).

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan inovatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, program kewirausahaan sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif, kewirausahaan sosial tidak hanya menciptakan peluang ekonomi tetapi juga memperkuat jaringan sosial di dalam komunitas.

Pertama, kewirausahaan sosial dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Darwis et al., kewirausahaan sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Darwis et al., 2021). Selain itu, penelitian oleh Hasanah menunjukkan bahwa program kompetisi proyek sosial di perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya mandiri secara ekonomi tetapi juga peka terhadap isu sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan sosial di antara mereka (Hasanah & Setiaji, 2019). Dengan demikian, program kewirausahaan sosial yang terstruktur dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan solidaritas di antara individu.

Kedua, inovasi sosial yang dihasilkan dari kewirausahaan sosial dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja sama. Siregar & Yusri menekankan bahwa kewirausahaan sosial berfungsi sebagai bentuk inovasi sosial yang dapat memperbaiki sistem yang ada di masyarakat (Siregar & Yusri, 2021). Melalui pendekatan ini, individu didorong untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Wibowo et al. juga mencatat bahwa inovasi sosial dalam praktik kewirausahaan sosial dapat membantu menyelesaikan masalah sosial yang kompleks dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Wibowo et al., 2021).

Ketiga, pendidikan kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat. Wijayanti et al. menunjukkan bahwa pendekatan design thinking dalam pendidikan kewirausahaan sosial dapat membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep kewirausahaan sosial secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial (Wijayanti et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Rahadi menyoroti pentingnya usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendukung kewirausahaan sosial, yang dapat memperkuat jaringan sosial di tingkat lokal (Rahadi, 2017).

Keempat, tantangan dalam implementasi kewirausahaan sosial juga perlu diperhatikan. Penelitian oleh Reindrawati menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah dan sumber daya yang terbatas dapat menghambat pengembangan kewirausahaan sosial di masyarakat (Reindrawati & Sos, 2017). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi inisiatif kewirausahaan sosial agar dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan ikatan sosial.

Kementerian Sosial mengadopsi pendekatan kewirausahaan sosial melalui berbagai inovasi pemberdayaan sosial di samping perlindungan dan jaminan sosial. Kemandirian rumah tangga miskin dapat dicapai jika penerima bantuan memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus solidaritas sosial. Berdasarkan pendekatan kewirausahaan sosial ini, Kementerian Sosial melaksanakan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk kewirausahaan sosial melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Program ini bertujuan menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial yang tercantum dalam Kepdirjendayasos Nomor 651/045.3/KPTs/10/2021 (Nadila, 2022). ProKUS merupakan program yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah graduasi atau keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar terbentuk kemandirian secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali miskin.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Program ini berfokus pada pemberdayaan keluarga miskin dan rentan dengan menggabungkan kegiatan bisnis dan sosial untuk mengatasi masalah sosial. ProKUS diluncurkan pada tahun 2020 sebagai pilot project dengan 1.000 KPM, terutama mereka yang lulus dari PKH. ProKUS memiliki tiga komponen yang disebut *Triple Power*, yaitu Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU), Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB) dan pendampingan sosial. Pendampingan usaha dilakukan Kemensos bekerja sama dengan Oorang Unpad, Politeknik Negeri Semarang (Polines), ZFN Agape Indonesia (Titipku), dan Bina Swadaya, dan juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial (Desi Purnamawati, 2020). Program bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial (Nadila, 2022). Dengan demikian, ProKUS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu individu atau kelompok dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat di komunitas mereka.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) hadir sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pengembangan usaha kecil yang mandiri dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menyediakan dukungan finansial, pelatihan kewirausahaan, dan akses jaringan sosial yang lebih luas (Subekti et al., 2022). Melalui pelatihan ProKUS, penerima manfaat tidak hanya memahami konsep dasar kewirausahaan tetapi juga mengalami peningkatan keterampilan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran, yang mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial (Paringsih et al., 2023). Dengan partisipasi dalam kegiatan kelompok seperti koperasi dan kelompok kerajinan, penerima manfaat dapat memperluas jaringan sosial mereka dan memperoleh dukungan dari sesama anggota komunitas (Seraj et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, ProKUS masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan modal dan sumber daya, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan kendala regulasi menjadi hambatan yang mempengaruhi keberhasilan program (Wahyuni et al., 2022). Mayoritas penerima manfaat belum mengoptimalkan strategi pemasaran dan kemasan produk, sehingga keberlanjutan usaha sosial mereka masih memerlukan dukungan dan bimbingan lebih lanjut (Utomo et al., 2023). Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dari pemerintah dan lembaga terkait, termasuk dukungan finansial berkelanjutan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penerima manfaat, ProKUS berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

Diharapkan dari artikel penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan hubungan sosial di kalangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih dalam tentang dampak ProKUS pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat, serta menyajikan rekomendasi untuk optimisasi program. Hasil penelitian ini juga diharapkan membantu pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung masyarakat yang rentan.

2. Metode

Penelitian deskriptif ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Sooko dan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, untuk mengevaluasi kontribusi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan membangun hubungan sosial berkelanjutan bagi penerima manfaat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam,

observasi, studi dokumentasi, dan tinjauan literatur. Partisipan penelitian meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), investor, tenaga kesejahteraan sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemangku kepentingan lainnya.

Data dianalisis secara tematik, mengidentifikasi kontribusi ProKUS terhadap peningkatan pendapatan dan hubungan sosial, serta mengevaluasi peluang dan tantangan program ini. Analisis mendalam juga melibatkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Hasilnya memetakan pengaruh ProKUS dalam mengatasi kemiskinan melalui kewirausahaan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan dari Dinas Sosial 3 orang, termasuk penerima manfaat 6 orang, investor 2 orang, TKSK 2 orang, pendamping PKH 2 orang, dan satu orang dari instruktur pusat inkubasi, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

Observasi lapangan dalam penelitian ini membantu memahami pelaksanaan program kewirausahaan dan partisipasi masyarakat secara langsung. Analisis studi dokumentasi dan literatur memperkuat hasil dengan data sekunder yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis mendalam untuk melihat dampak Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) terhadap pendapatan dan hubungan sosial penerima, serta menghasilkan rekomendasi peningkatan program. Sesuai (Denzin & Lincoln, 2011), penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam, dengan partisipasi aktif dari responden.

Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip dan diorganisir, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan tema penting. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi data, membandingkan hasil dari berbagai sumber. Analisis sistematis ini menyoroti dampak ProKUS dalam meningkatkan pendapatan dan relasi sosial penerima manfaat, serta mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi program. Temuan ini juga memberikan dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program ke depannya.

3. Hasil

3.1 *Implementasi Program Kewirausahaan di Mojokerto*

ProKUS merupakan inisiatif pemberdayaan sosial yang berfokus pada keluarga miskin dan berpendapatan rendah. Program ini menggabungkan kegiatan komersial dan sosial serta solusi bisnis terhadap permasalahan sosial dan ekonomi. Implementasi ProKUS dimulai pada tahun 2020 dan memberikan bantuan kepada 1.000 kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi. Jumlah KPM yang diberikan modal pada tahun 2021 bertambah menjadi 8.000, dimana 7.000 merupakan KPM PKH saat ini dan 1.000 merupakan KPM tahun lalu.

ProKUS dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), dengan dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan konsultan bisnis Inkubator Bisnis. Pada tahun 2021, terdapat 27 inkubator bisnis yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia (itsdrpm, 2021). Pemerintah berperan penting dalam mendukung kewirausahaan, termasuk menyediakan dana untuk mendukung kegiatan kewirausahaan. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan usaha dalam bentuk produk atau perlengkapan usaha, seperti peralatan produksi, perlengkapan usaha, materi promosi atau perlengkapan lainnya.

Berbisnis untuk kepentingan sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan masyarakat lokal terhadap kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kewirausahaan sosial dengan menyediakan layanan pendampingan. Ini dicapai melalui program pelatihan dan mentoring yang membantu usaha sosial mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bisnis mereka. Selain itu, pemerintah dapat memberikan izin kepada investor dan pemberi pinjaman untuk mendukung usaha kewirausahaan sosial. Ini akan membuat mereka lebih mudah mendapatkan uang. Dengan membantu pelaku usaha sosial menemukan pasar untuk barang mereka dan membangun hubungan antara pemilik usaha dan calon pembeli, pemerintah juga berperan penting dalam memfasilitasi akses pemasaran.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Program ProKUS Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif (ILBI) ITS, Inkubator UPN Veteran Surabaya, Inkubator Universitas Brawijaya, dan BPBRIN (Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi) Universitas Airlangga adalah beberapa mitra inkubator yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan Program Kewibawaan. Di Kabupaten Mojokerto, program dilaksanakan dengan memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat.

Inkubator bisnis atau kewirausahaan adalah kelompok kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sanitasi, antara lain. Ketika pengusaha atau pemerintah mengorientasikan operasi mereka untuk menciptakan nilai sosial, ide tentang wirausaha sosial muncul. (Al-Mubaraki & Busler, 2013) Inkubator bisnis dapat menjadi alat yang berharga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pemerintah dan organisasi lain harus mendukung pengembangan dan perluasan program inkubasi bisnis. Selanjutnya dalam artikelnya menunjukkan bahwa inkubator bisnis dapat memainkan peran penting dalam mendukung kewirausahaan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik untuk inkubasi bisnis di berbagai konteks.

Inkubator bertindak sebagai mentor bagi perusahaan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah untuk memberi penerima manfaat kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang terkandung dalam pedoman teknis perusahaan, seperti menghitung biaya, menentukan harga jual, dan mendapatkan saran. Dalam industri pemasaran Pemerintah Kota Mojokerto menawarkan inkubator bisnis untuk membantu pemulihian ekonomi warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan membantu penerima bantuan sosial yang memiliki pendapatan terbatas dapat mandiri secara finansial.

Sejak 2021, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto telah memberikan bantuan modal usaha kepada 285 KPM PKH aktif yang memiliki rintisan usaha, diprioritaskan berusia di bawah 40 tahun. Jenis usaha yang didukung meliputi produksi makanan dan minuman, kerajinan tangan, industri kecil serta perdagangan eceran. Para penerima manfaat mendapatkan pendampingan usaha dari UNAIR Surabaya, agar dapat meningkatkan kapasitas usaha, sehingga diharapkan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program ini dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Sooko dan Mojoanyar, dengan jenis usaha yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Di Kecamatan Sooko, para penerima manfaat terlibat dalam usaha produksi sepatu olahraga, kios bahan makanan ringan, kios isi ulang galon dan usaha kecil lainnya. Sementara itu, di Mojoanyar, usaha yang dijalani meliputi warung tempat ngopi dan jajanan dan jualan pentol baso dan sosis goreng keliling.

Kecamatan Sooko dan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, memiliki kondisi geografis dataran rendah yang mendukung pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Penduduknya didominasi oleh keluarga dengan mata pencaharian di sektor agraris, usaha kecil, dan informal. Tingkat kemiskinan di daerah ini cukup signifikan, terutama di antara pekerja berpenghasilan rendah, yang sebagian besar merupakan penerima bantuan sosial untuk pemberdayaan ekonomi. Bantuan tersebut mencakup pelatihan dan modal usaha bagi pengembangan usaha mikro. Potensi ekonomi daerah ini juga didukung oleh sumber daya lokal, namun keterbatasan akses dan literasi keuangan masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan.

Sebagai fokus dalam penelitian ini adalah usaha pengrajin sepatu olahraga di Kecamatan Sooko. Meski Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai pusat kerajinan alas kaki sejak 1995, kebanyakan pengrajin memilih menjual sepatu secara grosir tanpa merek lokal. Pemerintah daerah mendorong pengrajin untuk berinovasi dan menciptakan merek lokal, memberikan bimbingan dan pelatihan selama enam bulan serta modal usaha. Namun, modal yang diberikan seringkali tidak mencukupi, sehingga banyak pengrajin yang meminjam modal dari lembaga simpan pinjam lokal untuk memenuhi kebutuhan produksi. Beberapa dari mereka ragu untuk meminjam uang ke bank karena syarat dan cicilan yang memberatkan.

Salah satu penerima manfaat ProKUS adalah ibu "S", yang bersama suaminya dan dua saudaranya mampu memproduksi sekitar 60 pasang sepatu olahraga per hari. Harga sepatu olahraga berkisar antara Rp 60 ribu hingga Rp 180 ribu per pasang, tergantung pada model dan bahan. Mereka menjual sepatu melalui toko grosir, platform online seperti WhatsApp, atau langsung kepada pembeli. Usaha ini membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses produksi sepatu. Meski demikian, mereka seringkali harus meminjam modal dari toko grosir sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan produksi. Berikut pernyataan dari informan :

"Setiap hari kami bisa buat sekitar 60 pasang sepatu olahraga, dijual dengan harga mulai Rp 60 ribu sampai Rp 180 ribu, tergantung model dan bahan. Tantangan terbesar kami modal, kadang harus pinjam ke toko grosir untuk produksi. Tapi usaha ini sangat membantu keluarga kami dan bisa membuka peluang kerja untuk orang sekitar". (NA.B1)

Salah satu kisah inspiratif lainnya datang dari Kecamatan Mojoanyar, di mana Mas "SG" menjual pentol baso dan sosis goreng. Usaha ini sudah dijalankan selama 10 tahun dan mulai berkembang meski menghadapi banyak tantangan. Awalnya, Mas "SG" menggantikan orang tuanya yang sakit dan terpaksa berhenti bekerja. Dengan modal awal dari keluarga dan teman-teman, ia belajar berdagang dan memulai usahanya dengan berjualan di sekitar desa. Dalam satu hari, "SG" mampu menjual rata-rata 50 porsi pentol baso dan sosis goreng dengan harga Rp 5.000 per porsi. Dari usaha ini, ia mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000 per bulan, yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, sekolah anak-anak, dan menabung untuk masa depan.

Mas "SG" menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan penjual lain dan dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan penjualan. Meski begitu, ia terus beradaptasi dengan membuka layanan pesan antar dan menjaga kualitas makanannya. Ia menggunakan resep warisan dari ayahnya dan memilih bahan-bahan yang sehat untuk menjaga kualitas produknya. Usaha ini tidak hanya membantu perekonomian keluarganya, tetapi juga memberi dampak positif pada masyarakat sekitarnya. Seperti dinyatakan dalam wawancara :

"Awalnya saya hanya coba-coba menggantikan orang tua yang sakit. Dengan modal dari keluarga dan teman, saya mulai jualan pentol baso dan sosis goreng. Setiap hari bisa jual sekitar 50 porsi. Tantangannya banyak, terutama persaingan dan pandemi, tapi saya terus berusaha. Sekarang saya buka layanan pesan antar, jaga kualitas makanan, dan alhamdulillah usaha ini bisa bantu perekonomian keluarga saya." (NA.B2)

Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat ProKUS, terlihat bahwa program ini berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya modal usaha dan dukungan pemasaran. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung para wirausahawan lokal agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi komunitas mereka.

Dinas Sosial sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial di daerah, mengakui bahwa pengembangan ProKUS masih membutuhkan dukungan modal yang lebih besar. Selama ini ProKUS masih mengandalkan program dari pusat yang terbatas kuota. Sumber pembiayaan dari daerah perlu

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

didorong dengan kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi usaha kecil. Hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan :

"Tantangan utama dalam program kewirausahaan sosial adalah keterbatasan permodalan. Saat ini, sumber dana sebagian besar masih bergantung pada anggaran pusat, sementara daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Kami berharap ke depannya ada kebijakan yang lebih mendukung dari pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif, sehingga program ini bisa lebih berkembang dan merata di berbagai wilayah," (NB.A2)

Dinas Sosial tidak bisa berjalan sendiri melakukan pembinaan pemberdayaan ekonomi penerima ProKUS. Kolaborasi sebetulnya sudah dilakukan antara Dinas Sosial dengan Dinas UMKM untuk melakukan pembinaan lanjutan terutama untuk KPM PKH. Namun, pola keterlibatan pengusaha di daerah masih perlu ditingkatkan mengingat keluarga miskin memiliki karakter tersendiri yang tidak serta-merta bisa diarahkan ke ekonomi produktif. Tidak banyak pengusaha di daerah yang saat ini bisa dilibatkan. Keterbatasan wawasan ekonomi dan keengganan mengikuti pembinaan masih menjadi kendala. Diungkapkan oleh narasumber dari Dinas UMKM :

"Pembinaan masih sangat kurang pak, jadinya penerima manfaat kurang optimal mengembangkan usahanya. Pengusaha daerah belum banyak yang mau jadi mentor, makanya pembinaan tidak optimal. Di sisi lain, keluarga miskin ini kadang masih segan untuk ikut karena minimnya pemahaman dan kepercayaan diri mereka. Ke depan perlu lebih banyak lagi dukungan pengusaha lokal agar program ini lebih efektif," (NB.A3)

Namun demikian, kewirausahaan sosial memiliki peran penting dalam menciptakan tidak hanya pendapatan, tetapi juga hubungan sosial yang lebih kuat di dalam masyarakat. Ketika seseorang memulai usaha berbasis sosial, mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana usaha tersebut bisa memberi manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Melalui proses produksi, distribusi, dan penjualan, wirausaha sosial secara langsung berinteraksi dengan pelanggan, mitra, serta anggota komunitas lainnya. Interaksi ini menciptakan jaringan sosial yang saling mendukung, memperkuat rasa kebersamaan, dan membangun solidaritas antar warga. Di lingkungan yang erat, keberadaan wirausaha sosial tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar individu, menciptakan ruang untuk saling berbagi dan saling mendukung.

Selain itu, kewirausahaan sosial juga mampu membangun kepercayaan dalam komunitas, di mana orang-orang merasa terhubung secara ekonomi dan sosial. Dengan usaha yang melibatkan komunitas, wirausahawan tidak hanya menciptakan sumber pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan mereka. Hubungan yang terjalin melalui kewirausahaan sosial ini memungkinkan terbentuknya ikatan yang lebih erat, di mana masyarakat saling bergantung dalam memajukan kesejahteraan bersama. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial bukan sekadar soal keuntungan, tetapi juga soal memperkuat jaringan sosial dan mendukung pertumbuhan kolektif dalam komunitas.

"Sebagai wirausaha sosial, kami nggak cuma cari keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga gimana usaha ini bisa bermanfaat buat orang lain. Interaksi sama pelanggan, mitra, dan orang sekitar itu sangat penting. Jadi, kita saling bantu, saling kenal, dan akhirnya menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat. Usaha ini juga bikin kita lebih dipercaya, karena orang-orang merasa ikut terlibat." (NB.A1)

3.2 Tantangan Membangun Kemandirian Ekonomi dan Hubungan Sosial

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) telah membawa dampak positif dalam memberdayakan penerima manfaat, terutama keluarga yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, penerima manfaat belajar mengelola usaha dengan lebih baik, memahami pentingnya pencatatan keuangan, dan mengembangkan strategi usaha sederhana yang membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. ProKUS berhasil memunculkan semangat berwirausaha di antara para penerima manfaat, yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan sosial. Kesadaran tentang pentingnya kemandirian ekonomi semakin tumbuh, dan banyak penerima yang mulai memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Di sisi lain, program ini juga membantu membangun jejaring sosial yang kuat di antara penerima manfaat. Dalam kegiatan kelompok, seperti koperasi atau kelompok kerajinan, para peserta dapat bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam mengatasi berbagai tantangan usaha. Hubungan yang terbentuk melalui program ini memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas, menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan bersama. Melalui interaksi ini, penerima manfaat merasa memiliki dukungan sosial yang penting, yang tidak hanya membantu mereka dalam aspek bisnis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, program ProKUS tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan. Masalah utama yang ditemui adalah keterbatasan modal usaha dan minimnya keterampilan teknis di bidang kewirausahaan. Banyak penerima manfaat masih mengalami kesulitan dalam pemasaran produk dan belum optimal dalam menarik pelanggan melalui kemasan atau branding. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setiap individu agar potensi usaha mereka bisa berkembang dengan optimal.

Untuk meningkatkan keberhasilan ProKUS, diperlukan dukungan lebih dari berbagai pihak. Bantuan modal tambahan, pelatihan teknis yang lebih terarah, dan penyederhanaan proses administrasi akan sangat membantu penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya. Dengan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, ProKUS berpotensi tidak hanya menjadi solusi ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Program ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa penerima manfaat ProKUS menghadapi tantangan signifikan dalam membangun kemandirian ekonomi dan jaringan sosial yang kuat. Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha mikro, seperti warung atau kerajinan, sehingga penerima manfaat kerap sulit untuk memperbesar skala usaha. Hambatan ini semakin kompleks dengan minimnya akses ke pembiayaan formal, yang membuat mereka lebih bergantung pada pinjaman informal yang berisiko.

Selain itu, keterampilan kewirausahaan penerima manfaat umumnya masih terbatas, khususnya dalam aspek pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi bisnis. Dari segi sosial, membangun hubungan dan jaringan yang kokoh juga menantang, meskipun program ini memfasilitasi kegiatan bersama. Beberapa penerima manfaat merasa enggan berpartisipasi karena rendahnya kepercayaan diri atau takut gagal. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan ProKUS yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan pelatihan yang relevan dan dukungan yang lebih tepat untuk membantu penerima manfaat mengembangkan usaha secara mandiri sekaligus memperkuat jaringan sosial mereka.

4. Pembahasan

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Kabupaten Mojokerto telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam mendukung kemandirian

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

ekonomi melalui usaha kecil. Berkat pelatihan dan pendampingan yang diterima, banyak KPM kini mampu mengelola usaha secara mandiri dan mulai mendapatkan penghasilan tetap. Usaha-usaha yang dijalankan bervariasi, mulai dari warung kecil, kerajinan tangan, hingga produksi makanan ringan. Sebagian penerima manfaat melaporkan bahwa penghasilan dari usaha kecil ini membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Selain peningkatan pendapatan, ProKUS juga membekali penerima manfaat dengan keterampilan dalam pemasaran dan pencatatan keuangan sederhana. KPM yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan kini merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka. Melalui keterampilan ini, mereka tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga belajar pentingnya perencanaan dan manajemen usaha yang baik. Bagi sebagian KPM, adanya dukungan pendampingan secara rutin juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan usaha mereka.

ProKUS juga berperan penting dalam membangun jaringan sosial di antara para penerima manfaat. Banyak KPM yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi, di mana mereka saling berbagi pengalaman, tips usaha, dan mendukung satu sama lain. Interaksi ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih solid dan saling mendukung. Bagi para KPM, ProKUS telah membuka jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tantangan seperti keterbatasan modal dan keterampilan masih ada, tetapi ProKUS telah menjadi langkah awal yang memberikan harapan dan peluang bagi banyak keluarga di Mojokerto untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kewirausahaan sosial adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kewirausahaan sosial bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam inisiatif ini. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kewirausahaan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan membantu mereka membuka usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, program kewirausahaan sosial yang mendorong individu untuk membuka usaha kecil dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Kemandirian ekonomi ini juga dapat membuka peluang bagi pengembangan komunitas secara keseluruhan.

Selain itu, kewirausahaan sosial dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial seperti pengangguran dan ketimpangan sosial. Dengan membuka usaha yang melibatkan masyarakat terpinggirkan, inisiatif kewirausahaan sosial memberikan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya membantu mengatasi masalah sosial yang mendasar. Maseno & Wanyoike (Maseno & Wanyoike, 2022), memberikan studi investigasi tentang kewirausahaan sosial sebagai mekanisme untuk transformasi sosial dan dampak sosial di Afrika Timur. Kemudian bagaimana kewirausahaan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial di wilayah tersebut, serta dampak sosial yang dihasilkan. Misalnya, usaha yang melibatkan masyarakat lokal dalam produksi barang dan jasa dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi ketimpangan sosial.

Selanjutnya, kewirausahaan sosial juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui inisiatif kewirausahaan sosial, individu didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan

ekonomi, yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Peran kewirausahaan sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan mendorong individu untuk terlibat dalam inisiatif kewirausahaan sosial, dapat dibangun hubungan antarindividu yang lebih kuat dan jaringan sosial yang lebih solid. Ini bukan hanya tentang menciptakan bisnis untuk keuntungan, tetapi juga tentang memperkuat komunitas dan mempromosikan keterlibatan aktif dalam solusi sosial dan ekonomi (Mair & Marti, 2006). Partisipasi ini juga dapat membawa dampak positif dalam hal pemberdayaan komunitas, karena individu belajar untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam usaha mereka.

Kewirausahaan sosial juga menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Dengan mendorong individu untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi baru, kewirausahaan sosial dapat mempercepat proses penciptaan nilai tambah bagi masyarakat (Deci & Ryan, 2012). Ini juga dapat membantu membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan, karena individu terdorong untuk mencari cara-cara inovatif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Namun, untuk mencapai manfaat tersebut, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan modal dan sumber daya yang dapat menghambat pertumbuhan kewirausahaan sosial. Nicholls (Nicholls, 2010), memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan tantangan dalam membangun legitimasi kewirausahaan sosial, yang relevan dengan pembahasan tentang keterbatasan modal dan sumber daya yang dihadapi oleh praktisi kewirausahaan sosial. Individu yang terlibat dalam program kewirausahaan sosial sering kali membutuhkan dukungan finansial dan bimbingan teknis yang memadai agar usaha mereka bisa berjalan dan berkembang.

Selain itu, bimbingan teknis yang diberikan dalam program kewirausahaan sosial perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat. Banyak penerima manfaat merasa bahwa bimbingan teknis yang diberikan tidak relevan dengan jenis usaha mereka atau terlalu sulit untuk diikuti karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, program bimbingan teknis harus dibuat lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari latar belakang dan kemampuan mereka. Untuk memastikan keberhasilan kewirausahaan sosial, dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Tanpa dukungan ini, promosi usaha sosial dan pembangunan hubungan sosial menjadi lebih sulit (Zahra et al., 2009). Oleh karena itu, program kewirausahaan sosial perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk memastikan dukungan dan partisipasi mereka.

Masalah regulasi dan administrasi juga dapat menghambat perkembangan kewirausahaan sosial. Perizinan dan perpajakan yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi individu yang ingin memulai usaha sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan sosial agar individu dapat lebih mudah menjalankan usaha mereka. Secara keseluruhan, kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan, kewirausahaan sosial dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi, mengatasi masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, menumbuhkan inovasi, dan mendorong perubahan sosial yang positif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, program kewirausahaan sosial harus mengatasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan modal, bimbingan teknis yang sesuai, dukungan masyarakat, dan regulasi yang mendukung.

Guncangan pendapatan adalah penyebab umum kemiskinan rumah tangga (Hutahaean & Sitorus, 2022). Ketidakpastian pendapatan, yang juga dikenal sebagai "ketidakpastian pendapatan", adalah masalah yang sering dihadapi oleh penduduk yang rentan terhadap kemiskinan, yang memungkinkan mereka untuk terjerumus ke dalam kemiskinan dalam waktu singkat. Rumah tangga dapat mengalami kemiskinan di masa mendatang sebagai akibat dari banyak faktor negatif, termasuk ekonomi, iklim, kondisi alam, lingkungan sosial, dan faktor lainnya. Sebagai ilustrasi, pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial yang mengurangi aktivitas ekonomi, yang secara tidak

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

langsung menyebabkan penurunan pendapatan. Begitu pula, kehilangan kepala keluarga dapat mengurangi kesejahteraan.

Hubungan kompleks antara ketimpangan ekonomi dan dinamika kemiskinan ditunjukkan oleh penelitian tentang keduanya. Beberapa penelitian menunjukkan, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan dan memperburuk kemiskinan serta berdampak pada perubahan status sosial ekonomi individu dan kelompok dalam jangka panjang. Dinamika kemiskinan ditentukan oleh variabel seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Analisis literatur ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan serta konsekuensi dari hubungan ini terhadap kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk menurunkan ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Obayelu & Edewor, 2022). Ketidakstabilan pendapatan ekonomi keluarga adalah penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Perbedaan pendapatan menyebabkan kemiskinan, yang mengurangi kemampuan seseorang atau kelompok untuk membeli barang dan jasa penting.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. ProKUS dimaksudkan sebagai solusi untuk menangani berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan. Kewirausahaan sosial, menurut (Yunus, 2009), adalah "Usaha bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan melalui inovasi dan keberlanjutan finansial". Konsep kewirausahaan sosial muncul sebagai tanggapan terhadap masalah sosial yang sedang berlangsung. Seseorang atau kelompok orang dapat mendefinisikan "kewirausahaan" dengan cara yang berbeda. Kewirausahaan umumnya didefinisikan sebagai proses individu atau kelompok yang menggunakan metode dan peluang yang tersedia untuk menciptakan nilai, memenuhi kebutuhan, dan menghasilkan inovasi dan keunikan tanpa mempertimbangkan sumber daya yang ada (Stephen & Coulter, 2016). Wirausahawan menciptakan nilai dengan menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka berinovasi dengan mengembangkan solusi kreatif, baik dalam bentuk produk, layanan, proses, maupun model bisnis baru. Selain itu, wirausahawan juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko dengan menginvestasikan waktu, uang, dan energi tanpa jaminan kesuksesan.

Wirausahawan, dalam istilah yang lebih sederhana, adalah orang yang berani mengambil risiko untuk memulai dan mengelola bisnis mereka tanpa terbebani oleh ketakutan atau kecemasan, terlepas dari keadaan yang tidak pasti (Kasmir, 2007). Oleh karena itu, tujuan kewirausahaan sosial adalah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Seorang wirausaha sosial diharapkan bersedia membantu masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya kelas bawah, mengatasi kesenjangan di berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain. Menurut Prayogo (Prayogo, 2017), dalam jurnal "Agora" yang mengutip penelitian yang dilansir oleh wirausaha sosial di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, ditemukan bahwa tujuan utama wirausaha adalah menjadi agen perubahan, yang dapat memberikan ide dan solusi mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pembelajaran berbasis kewirausahaan atau entrepreneurship dianggap sebagai solusi lain yang mempunyai efek ganda, yaitu dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kualitas intelektual pegawai. Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kewirausahaan.

Kewirausahaan sosial telah menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan perekonomian di tingkat lokal. Menurut (Asnawati, 2021), kewirausahaan memainkan peran penting dalam mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Melalui kewirausahaan sosial, orang-orang yang sebelumnya mengandalkan bantuan sosial dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, mengentaskan diri dari kemiskinan, dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

ProKUS adalah inisiatif pemerintah yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dengan memberikan dukungan modal usaha dan pendampingan bagi KPM. Program ini melibatkan pelatihan dan dukungan dalam menciptakan usaha lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar di komunitas mereka. Sebagai contoh, ProKUS telah membantu para peserta memulai bisnis di bidang jasa kebersihan, kerajinan tangan, dan berbagai usaha kecil lainnya. Dengan adanya ProKUS, ketergantungan pada bantuan sosial berkurang, dan kesejahteraan keluarga meningkat secara bertahap.

Salah satu aspek penting dari kewirausahaan sosial adalah kemampuannya untuk memperkuat hubungan sosial. Melalui bisnis lokal, penerima manfaat ProKUS dapat berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan anggota komunitas lainnya, menciptakan jaringan sosial yang lebih luas. Interaksi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga meningkatkan rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota komunitas. Beberapa peserta ProKUS bahkan terlibat dalam kegiatan bersama, seperti koperasi atau kelompok kerajinan, yang memungkinkan mereka untuk bertukar pengetahuan dan dukungan.

Peran pemerintah dalam mendukung kewirausahaan sosial sangat penting. Pemerintah menyediakan sumber daya keuangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan usaha sosial. Pendanaan untuk kewirausahaan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hibah, pinjaman berbunga rendah, atau modal ventura. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak, menyederhanakan prosedur perizinan, dan menawarkan pelatihan serta pendampingan bagi wirausaha sosial.

Namun, ada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan kewirausahaan sosial. Keterbatasan modal dan sumber daya sering menjadi hambatan bagi individu untuk memulai dan mengembangkan usaha sosial. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan dapat membatasi kemampuan pengelolaan usaha. Selain itu, ketidaksesuaian bimbingan teknis dengan kebutuhan dan sumber daya penerima manfaat juga bisa menghambat keberhasilan program. Masalah regulasi dan administrasi kadang-kadang dapat menghambat perkembangan usaha sosial, berdampak pada pendapatan individu yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa program kewirausahaan sosial didukung dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan terhadap dampak sosial dari kegiatan kewirausahaan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendukung dan mengembangkan program-program yang mendorong kewirausahaan sosial. Dukungan pemerintah yang konsisten dan lingkungan yang kondusif adalah kunci agar kewirausahaan sosial terus menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan komunitas dan menciptakan dampak sosial yang positif. Selain itu hubungan sosial yang kuat dalam kewirausahaan sosial menjadi fondasi penting bagi keberhasilan usaha dan kesejahteraan komunitas. Melalui interaksi dengan pelanggan, mitra, dan komunitas, wirausahawan sosial mampu membangun jaringan dukungan yang saling menguatkan. Solidaritas yang terbentuk menciptakan ruang bagi pertukaran pengetahuan, saling percaya, dan kerjasama yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kewirausahaan sosial bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

membangun hubungan sosial yang mendalam, yang memperkuat ketahanan dan pertumbuhan komunitas secara kolektif.

5. Kesimpulan

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang diimplementasikan di Kabupaten Mojokerto terbukti mampu memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha mikro, tetapi juga mendorong penguatan hubungan sosial di kalangan komunitas. Dukungan modal dan pendampingan usaha yang disediakan oleh pemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, telah membantu keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Meski demikian, pelaksanaan ProKUS masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan modal usaha, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya literasi kewirausahaan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para peserta program. Beberapa penerima manfaat kesulitan untuk memanfaatkan bimbingan teknis yang tersedia karena tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam bentuk dukungan teknis yang lebih relevan dan akses yang lebih luas ke teknologi digital.

Dari sisi sosial, ProKUS juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas antar warga melalui kewirausahaan. Interaksi yang terjadi di antara individu dalam komunitas usaha tidak hanya meningkatkan jaringan sosial, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Hal ini membantu penerima manfaat dalam menghadapi tantangan usaha, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Keberlanjutan ProKUS sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dukungan yang lebih luas dari sektor swasta, terutama dalam hal pendanaan dan akses pasar, dapat membantu memperkuat dampak program ini. Selain itu, regulasi yang mendukung serta kebijakan yang memudahkan administrasi usaha sosial juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang dikelola oleh penerima manfaat.

ProKUS memiliki potensi besar untuk memberdayakan keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dengan penanganan yang tepat terhadap tantangan yang ada, serta dukungan yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak, kewirausahaan sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan di masyarakat.

6. Saran

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kewirausahaan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat dukungan terhadap program ini dengan memperluas akses modal dan sumber daya bagi penerima manfaat. Selain itu, regulasi yang mendukung, seperti penyederhanaan proses perizinan usaha kecil, akan sangat membantu dalam mempercepat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada peserta ProKUS sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar mereka dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya. Dukungan sektor swasta juga sangat penting dalam membantu keberlanjutan program ini melalui kemitraan strategis dan investasi. Dukungan dalam bidang pemasaran dan teknologi dari sektor swasta akan memperluas jaringan distribusi dan memperbesar akses penerima manfaat ke pasar yang lebih luas. Pelatihan bisnis yang

relevan dari sektor swasta akan membantu memperkuat kapasitas peserta ProKUS dalam menjalankan usaha mereka.

Lembaga pendidikan dan inkubator bisnis juga diharapkan berperan aktif dalam program ProKUS. Melalui riset dan inovasi, perguruan tinggi dapat membantu mengidentifikasi solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Inkubator bisnis dapat memberikan pendampingan jangka panjang dan membantu penerima manfaat memperluas jaringan pasar untuk produk-produk usaha sosial mereka. Dukungan ini akan sangat berpengaruh dalam memastikan kelangsungan usaha kecil yang dijalankan oleh penerima manfaat.

Selain itu, peran serta masyarakat lokal juga penting untuk kesuksesan ProKUS. Masyarakat dapat mendukung dengan membeli produk lokal dan mempromosikan hasil usaha penerima manfaat, dengan menjalin hubungan sosial yang baik antar wirausahawan sehingga memperkuat solidaritas sosial di komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong ProKUS untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial di masyarakat.

Ucapan terimakasih: Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, serta Pendamping Sosial Program PKH atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama proses penelitian di lapangan. Kontribusi dan sinergi dari semua pihak sangatlah berarti bagi kelancaran penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan Kabupaten Mojokerto dan wilayah lainnya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Mubaraki, H. M., & Busler, M. (2013). The effect of business incubation in developing countries. *European Journal of Business and Innovation Research*, 1(1), 19–25.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the multidimensional poverty index. *World Development*, 59, 251–274.
- Ardi Adji, Taufik Hidayat, Hendratno Tuhi man, Sandra Kurniawati, A. M. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan.
<https://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>
- Asnawati, S. E. (2021). KEWIRAUSAHAAN Teori dan Contoh Contoh Rencana Bisnis. Asnawati.
- Bansal, S., Garg, I., & Sharma, G. D. (2019). Social entrepreneurship as a path for social change and driver of sustainable development: A systematic review and research agenda. *Sustainability*, 11(4), 1091.
- Boffa, D., Prencipe, A., Papa, A., Corsi, C., & Sorrentino, M. (2023). Boosting circular economy via the b-corporation roads. The effect of the entrepreneurial culture and exogenous factors on sustainability performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 19(2), 523–561.
- Chundu, M., Masara, E., & Mucheri, T. (2022). Contribution of Social Entrepreneurship to Sustainable Community Development in Zimbabwe. A Case of Virtuous Women Trust Operating in Harare. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 10(3), 380–402.
- Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2021). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 4(2), 135–147.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of Theories of Social Psychology*, 1(20), 416–436.
- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik. Forind.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Desi Purnamawati. (2020). Kemensos luncurkan program kewirausahaan sosial.
<https://www.antaranews.com/berita/1915712/kemensos-luncurkan-program-kewirausahaan-sosial>
- Hasanah, U. U., & Setiaji, K. (2019). Pengaruh literasi digital, efikasi diri, lingkungan terhadap intensi berwirausaha mahasiswa dalam e-business. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 1198–1215.

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere & Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

- Hutahaean, Y. M., & Sitorus, J. R. H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja di Pulau Jawa. Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1), 1165–1176.
- International, A. (2023). Standar Hidup Layak.
- ITSDRPM. (2021). Standarisasi Pendampingan Inkubasi Bisnis ProKUS Kementerian Sosial. Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://www.its.ac.id/drpm/id/2021/11/15/standarisasi-pendampingan-inkubasi-bisnis-prokus-kementerian-sosial/>
- Iyengar, V. (2014). For Goodness, we will Change—An ultimate goal of the Entrepreneurs for effecting Social Enterprise. *Procedia Economics and Finance*, 11, 767–774.
- Kasmir. (2007). Kewirausahaan. PT. RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/kewirausahaan/>
- Laurens, S., & Putra, A. H. P. K. (2020). Poverty alleviation efforts through MDG's and economic resources in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 755–767.
- Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business*, 41(1), 36–44.
- Maseno, M., & Wanyoike, C. (2022). Social entrepreneurship as mechanisms for social transformation and social impact in East Africa an exploratory case study perspective. *Journal of Social Entrepreneurship*, 13(1), 92–117.
- Nadila, D. (2022). Analisis Kebijakan Kementerian Sosial Tentang Program Kewirausahaan Sosial Di Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 4(2), 1–8.
- Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(4), 611–633.
- Obayelu, A. E., & Edewor, S. E. (2022). Economic Inequality and Poverty Dynamics: What does Literature tell us? *Innovation Journal of Social Sciences and Economic Review*, 4(4), 21–31.
- Paringsih, Patemah, Hasan, M., Karman, A., Supatminingsih, T., Dermawan, A., Huwae, V., Suwarni, P., Sudirman, A., & Supartoyo, Y. (2023). Smart Entrepreneurship (Kreatif dan Inovatif Berwiusaha) (pp. 57–70).
- Pierson, C. (1998). Beyond the welfare state: The new political economy of welfare. Polity Press.
- Prayogo, C. (2017). Studi deskriptif social entrepreneur (studi kasus pada pemilik Agfa di Sidoarjo). *Agora*, 5(1).
- Rahadi, D. R. (2017). Analisis Sektor Usaha Kecil & Menengah Menjadi Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 159–173.
- Reindrawati, D. Y., & Sos, S. (2017). Tantangan dalam implementasi social entrepreneurship pariwisata di Pulau Madura. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 30(3), 215–228.
- Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 14(3), 418–434.
- Siregar, L. M., & Yusri, N. A. (2021). Kewirausahaan Sosial Sebagai Wujud Inovasi Sosial. *Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta*, 5(2), 476–490.
- Stephen, P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P. Jakarta. Erlangga.
- Subekti, P., Hafiar, H., Prastowo, F. X. A. A., & Masrina, D. (2022). Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Pengenalan dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 131–136.
- Svallfors, S. (2007). The political sociology of the welfare state: institutions, social cleavages, and orientations. Stanford University Press.
- Wibowo, H., Santoso, M. B., & Setiawan, S. A. (2021). Inovasi Sosial Pada Praktik Kewirausahaan Sosial Di Yayasan Al-Barokah Kota Banjar. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 210–218.
- Wijayanti, A., Widiastuty, E., & Febrianto, R. (2022). Mengetuk Hati, Membesarkan Jiwa: Pengenalan Dan 80

Muslim Sabarisman, Muhammad Belanawane Sulubere, dan Johan Arifin

Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Mojokerto

Penguatan Kewirausahaan Sosial Berpendekatan Design Thinking. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(1), 131–142.

Yunus, M. (2009). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. *Public affairs*.

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. *Journal of Business Venturing*, 24(5), 519–532.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).